



MENGEMBALIKAN KEMANUNGGALAN TNI DAN RAKYAT:

ANALISIS KRITIS TERHADAP TRADISI PEMBINAAN CALON PERWIRA TNI

Juang Pawana¹, Kukuh Setyo Pambudi², Muhaemin³

Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan

pawanajuang45@gmail.com, kukuhpambudi@ymail.com, muhaemin.tgl@gmail.com

ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah analisis kritis terkait dengan tradisi pembinaan calon perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendidikan merupakan awal mula dari tertanamnya doktrin dan karakter, terutama bagi para perwira TNI. Dalam proses pembinaan calon perwira TNI, ditemukan unsur tradisi dan pembinaan yang masih kurang sesuai. Menurut penulis, terdapat beberapa tradisi yang perlu ditelaah lebih jauh, seperti penanaman mental yang justru dapat menjauhkan diri dari rakyat. Tulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Berbagai sumber data penelitian dikumpulkan dengan cara studi literatur yang diperkuat dengan beberapa wawancara untuk memberikan klarifikasi dan klasifikasi atas data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa tradisi yang kontraproduktif terhadap visi dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat. Beberapa tradisi tersebut diantaranya tradisi jaga “pos monyet” dan pembentukan mental elitis yang jauh dari kesan “merakyat”. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi institusi TNI untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa tradisi di dalam pendidikan calon perwiranya. Selain itu, penulis juga berharap hasil dari kajian ini dapat bermanfaat bagi institusi TNI serta dapat mengembalikan kemanunggalan antara TNI dan Rakyat.

Kata Kunci: kemanunggalan TNI dan Rakyat, tradisi pembinaan, pendidikan karakter

ABSTRACT: *This paper aims to provide a critical analysis related to the tradition of training prospective the Indonesia National Army (TNI) officers. Education is the beginning of the embedded doctrine and character, especially in TNI officers. In the process of fostering prospective TNI officers, elements of tradition and coaching were found to be less appropriate. Unfortunately, according to the author, there are several traditions that need to be explored further, because they instill mentality that can distance themselves from the people. In this paper qualitative research methods are used with descriptive models. Sources of research data were collected by means of literature study and strengthened by several interviews to provide clarification and classification of the data that was collected. Based on the analysis that has been done, there are some traditions that are counterproductive to the vision to realize the unity of the TNI and the People. Some of these traditions include the tradition of guarding the "monkey post" and the formation of elitist mentality which is far from being "populist". It is hoped that this paper can become an input for TNI institutions to evaluate the educational*



traditions of their prospective officers. In addition, the authors also hope that the results of this study will benefit the TNI institutions and can restore the unity between the TNI and the people.

Keywords: *unity between TNI and people, tradition, character education.*

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan satu-satunya dinas ketentaraan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Pada awal terbentuknya TNI merupakan peleburan dari beberapa dinas ketentaraan (KNIL dan PETA) serta laskar-laskar. Akar sejarah TNI pada dasarnya sangat lekat dengan rakyat, karena sejatinya TNI merupakan tentara yang lahir, tumbuh dan berkembang di dalam janin rakyat. Oleh karena itu sejatinya kemanunggalan TNI dan Rakyat adalah sebuah keniscayaan. Namun, nampaknya keniscayaan akan kerja bersama TNI dan Rakyat masih berjalan dengan banyak persoalan dan menyisakan pekerjaan rumah seiring dengan sejarah relasi antara TNI dan Rakyat yang kerap diwarnai polemik.

Tentara Indonesia adalah tentara yang unik, baik dari segi sejarah bagaimana organisasi Tentara tersebut berdiri, maupun

bentuk yang dicapai. Said (2001)

menjelaskan bahwa Tentara Indonesia adalah tentara yang menciptakan dirinya sendiri. Hal ini didasari karena pada mulanya tentara Indonesia tidak diciptakan atau dibentuk oleh satu pemerintahan. Tentara Indonesia lahir dengan sendirinya, dari unit dan kelompok-kelompok yang secara harfiah ada di tengah masyarakat. Hal ini juga dikemukakan oleh Fattah (2005) dengan menyebut bahwa tentara Indonesia merupakan satu gerakan yang berasal dari bawah dan bukan merupakan inisiatif dari atas.

Kenyataan bahwa sejarah mencetak TNI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, tidak terlalu berjalan mulus. Banyak kondisi yang mengisyaratkan bahkan secara vulgar menunjukkan bahwa Tentara semakin berjarak. Beberapa kejadian yang tercatat dalam sejarah sebagai salah satu titik krusial yang sangat menciderai kemanunggalan TNI dan Rakyat



adalah adanya dwi fungsi ABRI di jaman Orde Baru. Dwi fungsi merupakan konsep yang dijalankan oleh Tentara Indonesia pada Orde baru yang mengembangkan fungsi tentara tidak hanya sebagai aparat pertahanan melainkan juga dalam kehidupan sosial dan politik (Crouch, 2019). Melebarnya fungsi tentara pada masa itu telah membuat jarak yang cukup dalam dan menjadikan tentara seakan memiliki kasta lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya.

Kenyataan bahwa adanya sejarah berjaraknya tentara dan rakyat di masa lalu, sesungguhnya telah cukup disadari oleh intelektual di tubuh TNI. Hal ini cukup terlihat dengan adanya beberapa slogan yang coba di populerkan beberapa tahun belakangan. slogan tersebut seperti “Bersama Rakyat TNI Kuat” yang dipopulerkan semenjak tahun 2017 bertepatan dengan HUT TNI ke 72 (Purnamasari, 2017). Kegiatan untuk mempopulerkan atas slogan tersebut juga masih terus dilakukan hingga saat ini, dimana slogan ini masih sering terdengar pada beberapa gelaran TNI. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah yang cukup mendasar dalam pola pembinaan TNI

yang menurut penulis perlu untuk dibenahi dalam rangka menciptakan kondisi TNI yang lebih baik.

Permasalahan yang kerap terjadi adalah slogan kemanunggalan TNI dan Rakyat hanya menjadi slogan. Kenyataannya dapat dilihat dalam perenggai TNI khususnya di tingkat perwira yang masih berjarak bahkan memang mengambil jarak dari masyarakat. Sihotang (2016) bahkan menyebut bahwa TNI telah membuat suatu kelas sosial tersendiri dengan posisi yang dimilikinya. Bahkan tidak jarang masyarakat berlomba-lomba menjadi anggota TNI hanya untuk memperbaiki atau mengangkat kelas sosial yang dimilikinya. Hal ini cukup ironis, karena secara tidak langsung dapat mengerus esensi dari filosofi tentara rakyat itu sendiri.

Banyak hal yang perlu dikritisi dalam membangun TNI yang lebih baik kedepannya. Salah satu yang menurut penulis cukup krusial adalah pola pembinaan calon perwira TNI yang terkesan untuk dijauhkan dari rakyat. Selain itu pola-pola peninggalan kolonial yang juga masih kental dipertahankan bahkan di pusat-pusat pendidikan pertama para calon perwira TNI.



Oleh karena itu, diperlukan satu perubahan yang membangun dengan tujuan besar untuk mengembalikan marwah TNI dan rakyat yang melekat dan saling membantu.

DILEMA KEMANUNGGALAN TNI DAN RAKYAT

TNI harus kembali kepada rakyat dengan makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jargon saja tidak akan cukup untuk mengembalikan TNI kepada rakyat. Kenyataan bahwa tentara adalah bagian dari rakyat juga telah dicanangkan oleh Panglima TNI yang pertama; Sudirman dengan kata-katanya yang terkenal.

“TNI adalah milik rakyat, sesuai dengan jati diri tentara, TNI ini dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.”

Kutipan tersebut mengisyaratkan dengan jelas posisi yang dicita-citakan oleh pendahulu TNI yakni menempatkan TNI sebagai bagian tak terpisahkan dari rakyat.

Kemanunggalan TNI dan Rakyat adalah sebuah konsep yang sangat erat kaitannya dengan rasa saling percaya dan saling menjaga. Hal ini cukup tercermin dalam perjalanan awal tentara Indonesia

yang memiliki banyak sekali kemudahan dalam melakukan operasi dengan bantuan masyarakat. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Sudirjo (1985) dimana kisah perjuangan Sudirman di saat masa gerilya adalah kondisi yang sangat bergantung dari rakyat. Seluruh logistik dan pengumpulan informasi dilakukan sepenuhnya dengan peran masyarakat. Kerja sama yang erat antara tentara dan rakyat di masa itu adalah buah dari kepercayaan yang terjalin erat dan terus dipertahankan dengan baik oleh Sudirman dengan tidak memperlakukan rakyat sebagai orang lain atau justru musuh.

Anggota TNI pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat yang terpilih untuk kemudian diberikan kepercayaan menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Cikal bakal TNI juga terlahir dengan semboyan “Dari Rakyat Dan Untuk Rakyat” sehingga tidak masuk akal apabila TNI menempatkan dirinya ada di atas rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Atno & Utama (2018) yang menjelaskan bahwa proses kelahiran TNI adalah kehendak rakyat. Sehingga jelas bahwa harusnya tidak boleh ada kasta antara TNI dan Rakyat. Meskipun pada kenyataannya, TNI kerap diperlakukan



dan memperlakukan dirinya seakan bukan bagian dari masyarakat dengan bersikap arogan dan menekan masyarakat. Hal ini cukup banyak tergambar dengan adanya beragam kasus yang menghadap-hadapkan antara TNI dengan rakyat.

Posisi antara TNI dan Rakyat yang dalam sejarah pembentukannya merupakan satu kesatuan, kemudian berevolusi menjadi bentuk yang teramat baru dengan menjadi tentara reguler. Bentuk ini menurut Bahar (2003) menjadi titik mula paradox yang dapat dijangkiti oleh TNI dengan adanya kemungkinan organisasi TNI yang menjauh dari rakyat. Lebih lanjut, TNI yang saat ini yang secara terang dituntut untuk menjadi tentara yang profesional telah melakukannya dengan cukup baik. Namun peralihan TNI dari karakter praetorian juga jelas-jelas menerangkan bahwa TNI telah memiliki jarak dari rakyat.

Pergeseran TNI untuk menjadi Tentara yang profesional dimulai ketika era reformasi tahun 1998. Dijelaskan oleh Maarif (2015) bahwa TNI di masa tersebut memilih untuk mengurangi peranannya di bidang sosial politik dan menjadi tentara dengan kontrol sipil. Hal ini sesungguhnya

dapat dibaca sebagai salah satu kekecewaan rakyat terhadap TNI yang telah cukup lama mengambil peran ekstra dalam dwi fungsi dan melupakan hakikat dirinya sebagai tentara yang merupakan bagian dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa konsep Tentara yang profesional dapat dilaksanakan pada TNI namun, konsep tersebut tetap tidak boleh melupakan doktrin awal dan sejarah awal terbentuknya TNI sebagai tentara rakyat.

Profesionalisme TNI sebenarnya tidak boleh menjadi alasan atas berjaraknya TNI dengan rakyat. Hal ini dapat menjadi sebuah kemunduran, karena sejatinya kekuatan TNI adalah pada rakyat. Dalam sistem pertahanan negara Indonesia yakni “Sistem Pertahanan Rakyat Semesta” sesungguhnya cukup jelas dalam menerangkan harus adanya keterlibatan TNI dan rakyat yang simultan. Selain itu faktor sejarah sebenarnya juga sangat kuat menjadi argumen dalam menjelaskan keterikatan TNI dan rakyat. Bahwa urusan profesionalisme TNI hanyalah sebatas TNI tidak boleh mengelola bisnis, dan berpolitik, serta dijamin kesejahteraannya. Oleh karena itu, menjadi sebuah pertanyaan bagi



penulis, apakah menjadi profesional berarti harus meninggalkan rakyat?. Sedangkan jelas dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI P.2 menerangkan bahwa jati diri TNI adalah Tentara Rakyat.

KRITIK TERHADAP PENDIDIKAN CALON PERWIRA TNI

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama bagi penulis adalah tentang pola pendidikan calon perwira TNI. Hal ini cukup mendasar bagi penulis, karena disinilah diletakkan dasar-dasar perilaku dan doktrin bagi calon pemimpin TNI di masa depan. Sehingga apabila ingin merunut dan merubah letak yang tidak harmonis antara TNI dan rakyat dapat dilakukan melalui celah ini. Beberapa pola pendidikan calon perwira TNI yang kurang sesuai dengan cita-cita manunggal dengan rakyat diantaranya adalah pembentukan jiwa yang berjarak dengan rakyat.

Pembentukan calon perwira TNI dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah Akademi, dan Sekolah Calon Perwira. Kedua pola pembentukan tersebut sebenarnya memiliki satu hal yang sama yakni pembentukan perilaku dan

penjiwaan atas peran. Hal ini menjadi penting karena pola perilaku yang ditanamkan akan menjadi satu kebiasaan yang terbawa dan diterapkan secara mendalam oleh calon perwira pada saat bertugas nantinya. Konsep pembentukan ini dalam teori sosiologi dapat dijelaskan sebagai sebuah strukturasi atau sesuai pembentukan struktur-struktur tertentu yang secara berkala dilakukan dengan tujuan tertentu (Gidens, 1984). Pola yang berulang akan memastikan satu sistem sosial menjadi sebuah kenyataan, hal ini yang mungkin menjadi satu penjelasan mengapa TNI dapat terkesan berjarak dengan rakyat.

Dalam tradisi pembinaan calon perwira TNI, terdapat tata aturan yang mewajibkan Taruna/Taruni nya untuk tidak berada dekat dengan rakyat. Sebagai satu contoh adalah aturan yang mewajibkan agar Taruna dan Taruni akademi agar memilih kendaraan umum yang tertutup dan tidak bercampur dengan masyarakat, seperti taxi. Aturan ini ada dan secara nyata dilaksanakan sewaktu pesiar dengan dalih memberikan keamanan bagi



Taruna/Taruni tersebut¹. Namun, bukankah menjadi satu barang yang problematik karena secara terang-terangan kondisi ini akan membentuk taruna agar tidak mau berbaaur dengan masyarakat dan menjadi seseorang yang eksklusif. Tentunya ini bukanlah suatu ketakutan atau paranoid terhadap satu hal yang remeh-temeh. Bahwa konsep remeh dapat membekas secara nirsadar dan menjadi satu buah perilaku yang menetap telah dijelaskan oleh Bourdieu (1986) dalam empat konsepsi yakni *habitus*, *capital*, *field* dan *doxa*.

Selain pola pembinaan yang memisahkan kendaraan umum antara calon perwira dan masyarakat, juga terdapat beberapa tradisi lain yang kurang relevan. Salah satunya adalah larangan bagi Taruna/Taruni untuk makan di warung sembarangan. Ketentuan ini mungkin juga terlihat remeh, namun dapat dibayangkan apabila terdapat kondisi yang mengharuskan para Perwira untuk makan dan berinteraksi dengan masyarakat secara bebas, apakah calon perwira tersebut dapat

secara luwes berinteraksi. Beberapa ketentuan yang disebut oleh penulis, masih dapat terlihat pada Peraturan Kehidupan Taruna (2017) yang cukup detail membahas mengenai aturan pada kehidupan taruna akademi TNI.

Kondisi terakhir yang juga cukup memprihatinkan adalah adanya tradisi jaga “pos monyet”. Tradisi ini dilakukan dengan jalan mengharuskan para calon perwira dan prajurit TNI agar berjaga di pos penjagaan (yang biasanya ada di depan) secara bergantian. Pos ini mendapatkan istilah “pos monyet” dikarenakan pada sejarahnya (pada masa KNIL) pos ini dijaga oleh mayoritas pribumi. Sehingga julukan monyet adalah julukan bagi pribumi. Sekali lagi, meskipun nampak sederhana, julukan ini merupakan warisan kolonial dan melahirkan kesan yang tidak baik. Kesan ini bahkan sangat erat kaitannya dengan kesan SARA yang cukup mengganggu dan menjadi concern bagi banyak masyarakat. Lantas menjadi pertanyaan kembali, apakah tradisi semacam ini harus terus untuk diteruskan. Seharusnya tradisi kolonial seperti ini sudah sewajarnya untuk ditinggalkan.

MEMBENAHİ POLA-POLA PENDIDIKAN

¹ Pernyataan dari Gubernur AAL yang dimuat dalam laman www.jawapos.com/nasional/03/02/2017/pesiar-waktu-me-time-taruna-taruni-aal-dapat-hak-istimewa-sesuai-nilai/

CALON PERWIRA TNI

TNI adalah alat negara yang sangat penting peranannya bagi Indonesia. Oleh karena itu penting untuk tidak membuat TNI menjadi sosok tentara yang menakutkan dan jauh dari rakyat. Sihotang (2016) dalam penelitiannya menyebut bahwa pola dan kultur TNI di masa reformasi sejatinya telah banyak berubah dengan adanya agenda reformasi di tubuh TNI. Meskipun demikian, TNI tetap memiliki pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Salah satunya adalah relasi TNI dan Rakyat yang masih sebatas jargon. Pembinaan yang mungkin dilakukan adalah dengan membangun kesadaran akan jati diri TNI sejak dini.

TNI harus mulai membentuk pola calon perwiranya untuk lebih mendekat dengan rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah kecil agar mereka tidak anti kepada masyarakat. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan dan memungkinkan sekali untuk merubah hal tersebut mulai dari beberapa tradisi yang kecil. Beberapa hal yang diusulkan penulis untuk dapat diterapkan pada pembinaan calon perwira TNI diantaranya.

1. Mengembangkan program-program yang bertujuan untuk memberikan pengalaman interaksi antara calon perwira TNI dengan rakyat.
2. Menghapuskan aturan yang membawa jarak Calon TNI dan Rakyat, seperti angkutan umum dan tempat makan.
3. Menghapuskan istilah “pos monyet” dan menggantinya dengan istilah yang lebih positif seperti “pos jaga” atau “gerbang perwira”.
4. Memberikan *reinforcement* kerja sosial yang memungkinkan para calon perwira mengabdikan secara langsung kepada rakyat.

Dengan diterapkannya pola-pola pembinaan ini, diharapkan bibit kemandirian TNI dan Rakyat yang sejati dapat lebih berkembang secara organik. Selanjutnya para Calon Perwira ini akan secara alami memiliki naluri untuk melaksanakan tugas-tugas teritorial yang selama ini menjadi kekuatan bagi TNI.

Kemandirian bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan, hal ini



hanya masalah mau dan tidak mau belaka. Pola-pola pembinaan yang kecil, dapat berarti luas dan besar apabila diterapkan secara konsisten dan disertai dengan program yang terarah. Memastikan TNI tidak terpisah dengan rakyat dan kembali pada jati dirinya adalah keinginan kita bersama sebagai insan bangsa Indonesia yang mencintai TNI dan bangga dengan TNI sebagai punggwa penjaga kedaulatan bangsa. Besar harapan penulis agar TNI dan Rakyat dapat bekerja sama dan berkontribusi bersama dengan semangat yang sama seperti pada mula Tentara Indonesia terbentuk

KESIMPULAN

TNI merupakan Tentara rakyat sebagaimana jati diri yang tercantum dalam UU No 34 tahun 2004. Hal ini tidak dapat dibantah dan merupakan suatu keniscayaan yang didukung oleh sejarah TNI itu sendiri. oleh karena itu langkah-langkah yang menjauhkan TNI dari Rakyat adalah sebuah langkah yang ahistoris dan tidak bertanggung jawab. Bahwa TNI bertransformasi menjadi tentara yang profesional juga tidak boleh menjadikan sebuah alasan TNI harus pergi menjauh dari

rakyat.

Terdapat beberapa catatan terhadap pola pendidikan TNI yang harus menjadi perhatian untuk masa depan TNI. Beberapa tradisi itu diantaranya adalah aturan-aturan yang mewajibkan para calon perwira untuk tidak menyatu dengan rakyat dengan jalan memisahkan angkutan dan makan di tempat yang tertutup. Selain itu juga terdapat “pos monyet” yang merupakan peninggalan kolonial dan masih terus dipertahankan sampai sekarang. Oleh karena itu TNI harus mulai memperhatikan beberapa pola pendidikan tersebut, untuk memangkas adanya jarak antara TNI dan Rakyat. Perubahan harus dimulai dari pembentukan mental yang tentu akan berdampak besar bagi pribadi Perwira TNI ketika nanti mengemban tugas.



DAFTAR REFERENSI

- Atno, A., & Utama, N. J. (2018). Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947. *Journal of Indonesian History*, 7(1), 12-18.
- Bourdieu, Pierre. (1986). The Forms of Capital'. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Capital*. J. G. Richardson. New York: Greenwood Press.
- Bahar, S. (2003). Resiko Keterasingan Insti Tusional Tni Dari Rakyat Urgensi Penyegaran Perhatian terhadap Posisi Etnisitas dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 8(2003).
- Said, S. (2001). *Militer Indonesia dan politik: dulu, kini, dan kelak*. Pustaka Sinar Harapan.
- Crouch, H. (2019). *The army and politics in Indonesia*. Cornell University Press.
- Fattah, A. (2005). *Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Anthony Giddens. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Univ of California Press.
- Ma'arif, S. (2015). *Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi*. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 257-286.
- Purnamasari, Niken. (2017). Dirgahayu TNI! 'Bersama Rakyat TNI Kuat'. <https://news.detik.com/berita/d-3670899/dirgahayu-tni-bersama-rakyat-tni-kuat>
- Sudirjo, R. U. (1985). *Panglima Besar Sudirman: sebuah kenangan perjuangan*. BP Alda/Penerbit Almanak RI.
- Sihotang, K. J. (2016). Struktur dan Kultur Dominasi: Relasi Agensi dan Strukturasi dalam Pembentukan Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat pada Era Reformasi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(2), 75-87.
- Mabes TNI. (2017). *Peraturan Kehidupan Taruna TNI*. Mabes TNI.